

**KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH SECARA NONLITIGASI DALAM SISTEM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum dan Hukum Islam

Oleh:

**EKO PRIADI**  
**NIM. 135010112111006/10220011**



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
FAKULTAS SYARIAH  
2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NONLITIGASI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti skripsi ini disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Februari 2015

Penulis,

Eko Priadi

NIM. 135010112111006/10220011

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eko Priadi, NIM. 10220011, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan NIM. 135010112111006, judul Skripsi:

### **KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NONLITIGASI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Februari 2015

Dosen Pembimbing  
Universitas Brawijaya,

Dosen Pembimbing  
Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim,

Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.  
NIK 80121601120265

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.  
NIP 196910241995031003

Mengetahui,  
Kepala Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Djumikasih, S.H., M.H.  
NIP 197211301998022001

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.  
NIP 196910241995031003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Eko Priadi, NIM 10220011, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NIM. 135010112111006, dengan judul:

### **KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NONLITIGASI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji:

1. Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP 195912161985031001 ( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama
  
2. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.  
NIP 197406192000031001 ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua Penguji
  
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.  
NIP 196910241995031003 ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris I
  
4. Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.  
NIK 80121601120265 ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris II

Malang, 11 Maret 2015

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya,

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim,

Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP 196208051988021001

Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 196812181999031002

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

(Qs. Al-Hujurat Ayat 10)

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya, semoga kita semua termasuk diantara hamba-hambanya yang beriman dan bersyukur. *Shalawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amien.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kedudukan Hukum Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**. Dan secara khusus, Penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim.
5. Ibu Djumikasih, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya.
6. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan Penulis pada penelitian ini.

7. Ibu Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.H.I, dan Dr. Lucky Endrwati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
9. Ibu Faridatus Syuhadak, M.H.I dan Bapak Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Syariah, terima kasih telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi, baik melalui sumbangsih pemikiran maupun buku-buku sumber rujukan.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Dosen Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal di masa mendatang. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian.
11. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya kepada Drs. Ferry Subagio dan Bapak Supardi, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
12. Ayah (Juriadi), Ibu (Afrida) dan Adik (Rizka Afdianti) tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, semangat dan doa yang tiada henti selama ini. Semoga Penulis mampu mewujudkan impian yang menjadi cita-cita keluarga.
13. Seluruh keluarga besar Alm. H. Misran dari pihak ayah dan keluarga besar Alm. H. Karno dari pihak ibu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih baik, dan senantiasa merekatkan ikatan kekeluargaan kita.

14. Sahabat seperjuangan peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan, Mahrus Ali, Dessy Stifany, Yayang Ragil, M. Riza Aufa, dan teman-teman yang lain, terimakasih penulis ucapkan atas kerjasama dan bantuannya selama ini.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan di Ikatan Mahasiswa HBS (IMHBS) 2010, LDK Masjid At-Tarbiyah, Sharia Economic's Students Community (SESCOM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Maliki Malang, dan Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara terima kasih telah mengajarkan Penulis akan makna perjuangan dan kebersamaan. Semoga Allah SWT senantiasa merekatkan ikatan ukhuwah diantara kita.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Malang, 23 Februari 2015

Penulis,

Eko Priadi

NIM. 135010112111006 /10220011



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= St	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة: menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, seperti misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah***

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
2. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
3. Billáh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, telah berkomitmen untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Definisi Konseptual</b> .....	<b>10</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Hukum.....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	19
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Mengenai Advokat</b> .....	<b>22</b>
1. Pengertian Advokat .....	22
2. Landasan Yuridis Profesi Advokat.....	24
3. Peran Yuridis Advokat .....	25

4. Kewenangan Advokat Sebagai Penegak Hukum .....	30
5. Organisasi Advokat .....	33
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.....	35
2. Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syariah .....	37
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	39
<b>C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi.....</b>	<b>48</b>
1. Konflik dan Sengketa .....	48
2. Upaya Penyelesaian Sengketa.....	49
3. <i>Alternative Dispute Resolution</i> Sebagai Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi.....	54
4. Bentuk-Bentuk <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	57
<b>D. Tinjauan Umum Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....</b>	<b>67</b>
1. Pengertian Sistem Peraturan Perundang-Undangan.....	67
2. Dasar Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	68
3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	69
4. Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	71
<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kedudukan Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....</b>	<b>73</b>
1. Pengertian Kedudukan Hukum .....	73
2. Kedudukan Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum .....	75
3. Kedudukan Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi.....	78
<b>B. Implikasi Hukum Kedudukan Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi .....</b>	<b>97</b>

<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>106</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2 Perbandingan Penyelesaian Litigasi dan Nonlitigasi .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Bukti Konsultasi Skripsi



## ABSTRAK

Eko Priadi, NIM. 135010112111006/10220011, *Kedudukan Hukum Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Skripsi, Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.

---

**Kata kunci:** Advokat, Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi.

Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dalam tiga dasawarsa terakhir ini turut berdampak pada semakin meningkatnya potensi timbulnya sengketa ekonomi syariah. Untuk kepentingan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien, para pihak yang bersengketa cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Umumnya, para pihak yang bersengketa menggunakan jasa profesional Advokat untuk membantu menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana implikasi hukum kedudukan advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan secara nonlitigasi advokat berkedudukan sebagai *wakil* yang memberikan jasa hukum untuk menjalankan kuasa, mewakili, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum kliennya. Disamping itu, advokat juga dapat berperan sebagai konsultan hukum, negosiator, mediator, konsiliator, dan arbiter. Kedudukan advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi tersebut memiliki beberapa implikasi hukum sebagai berikut: 1) bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai syarat-syarat bagi konsiliator, negosiator, mediator, dan konsiliator dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan terjadinya kekosongan norma (*vacuum of norm*) sehingga menimbulkan celah hukum bagi advokat untuk menjalankan peran tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nonlitigasi; 2) terjadinya kekaburan makna kedudukan advokat sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## ABSTRACT

Eko Priadi. Student ID Number 135010112111006/10220011. *Advocate Position in Non-litigation Dispute Settlement of Sharia Economic in the Legislation System of Indonesia*. Thesis. Double Degree Program Between Faculty of Law of Brawijaya University and Sharia Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.

---

**Keywords:** Advocate, Sharia Economic, Non-Litigation Dispute Settlement.

The growth of Sharia Economic accelerating in last three decades is also affecting the increasing of potential disputes on sharia economic field. For the purposes of fast, effective and efficient dispute settlement, the disputing parties tend to prefer non-litigation dispute settlement through alternative dispute settlement procedure (ADsP). Usually, the parties using the professional services of an Advocate to help resolving their disputes or legal issues.

This study consists of two problem, (1) how is advocate positions on non-litigation settlement of sharia economic disputes in the regulations in Indonesia, and (2) how is legal implication of advocate in non-litigation settlement of sharia economic disputes in the regulations in Indonesia. This research is a normative legal research conducted by the statue approach. In addition, the analysis of legal sources made by the method of grammatical interpretation and systematic interpretation.

The results showed that in non-litigation disputes settlement of sharia economic, advocate stand as the representative who provide legal services to run power, represent, and/or do any legal action in the interest of his client. Moreover, advocate can act as the legal consultant, negotiator, mediator, conciliator, and arbiter. The position of advocate in non-litigation disputes settlement of sharia economic has some legal implication as follows: (1) the legal absent of standard requirement for conciliator, negotiator, and mediator in regulation No. 30/1999 is affecting the vacuum of norm which causing the space of law to the advocate for implementing their role to settle the non-litigation disputes of sharia economic; (2) according to the section 5 regulation No. 18/2003 about advocate, there is an unclear position of advocate as law enforcer.

## ملخص البحث

إيكو بريادي، 10220011 \ 135010112111006. موقف المحامي في تسوية المنازعات الاقتصادية الشريعة غير التقاضي عند القانون الإندونيسية. البحث الجامعي. قسم الحكم الاقتصادي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف الأول: د. الحاج نور ياسين، الماجستير.

المشرف الثاني: صانتيرزقوان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المحامي، الاقتصادية الشريعة، تسوية المنازعات غير التقاضي.

النمو السريع من الاقتصاد الشريعة في هذه العقود الثلاثة الأخيرة هو يؤثر أيضا لزيادة المنازعات المحتملة في مجال الاقتصاد الشريعة. ولغرض تسوية المنازعات السريعة والفعالية والكفاءة، وجب على كلا أطراف المتنازعين تنفيذ تسوية المنازعات غير التقاضي كطريقة البديلة في تسويتها. وعادة، استخدام كل من الأطراف المتنازعات خدمات من المحامي المهنية لأنيساعد حلهم في النزاعات والمسائل القانونية الأخرى.

تتكون هذا لدراسة منا لمشكلتان اثنتان، (1) أينمو اقفالمحامي في تسوية المنازعات الاقتصادية الشريعة غير التقاضي لقانون الإندونيسية، و (2) كيفا لضمنا لقانوني للمحامي في تسوية المنازعات الاقتصادية الشريعة غير التقاضي لقانون الإندونيسية. هذا البحث أحد من البحوث القانونية المعيارية. واستخدم طريقة التفسير النحوي والتفسير القانوني في تحليل مصادر القانونية.

ظهرت النتائج من هذا البحث أن تسوية المنازعات الاقتصادية الشريعة غير التقاضي، قام المحامي محل موكله يقوم بخدمة قوته وسلطانه والقيام بمبايعة قانون في مصلحة موكله. وكذلك يمكن للمحامي أن يقوم كالمستشار القانوني والمفاوض الوسيط والموفق المحكم. وأما موقف المحامي في تسوية المنازعات الاقتصادية الشريعة غير التقاضي لها لأثر القانوني كما يلي: (1) عدم الشروط القياسية لقانوني للموفق والمفاوض والوسيط في القانون رقم 1999/30 يؤثر إلبفرا غالق اعدة الذي يسبب إلبالفضاء القانوني لدي المحامي لتنفيذ دورها في تسوية المنازعات الاقتصادية الشريعة غير التقاضي؛ (2) وفقا للقسم 5 في القانون رقم 2003/18 حولا لمحامي، هنا كموقف غير واضل لمحامي كالمنفذ القانون.